

**Analisis Kinerja Lurah terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu**

**Ade Hidayat, Malvira Pohan, Sayidah Latifah Hanum, Putri Kemala Dewi**

Universitas Negeri Medan

adehidayatskm0@gmail.com , malviraaviraa@gmail.com , latifahsh26@gmail.com,  
putrikemala@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this research was to describe how the ward Binaraga , Rantau Utara Subdistrict, Labuhan Batu regency carries out the duties as outlined in government regulation Number 73 of 2005 concerning sub-districts related to tasks that should be carried out by the government, namely (a). implementation of sub-district government activities; (b). community empowerment; (c). Community service; (d). implementation of peace and general agreement; (e). maintenance of public service infrastructure and facilities; and (P). This research uses a qualitative approach with data collection techniques of interviews, observation, document review. The object studied is the performance of the village head towards regional development and regional autonomy. Based on this research, the task that has been fully carried out effectively is the community service task in the area of improving stabilizer infrastructure. Meanwhile, the assistance tasks are the same, but the PKH and BLT programs have not been fully implemented fairly, where when the assistance is distributed there is still a wrong target.*

**Keywords:** village head performance, regional development, regional autonomy

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk menggambarkan bagaimana Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara kabupaten Labuhanbatu menjalankan tugas yang sebagaimana dipaparkan pada Peraturan pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan terkait tugas yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah yaitu (a). pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; (b). pemberdayaan masyarakat; (c). Pelayanan masyarakat; (d). penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; (e). pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan (f). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, telaah dokumen. Objek yang diteliti ialah kinerja lurah terhadap pembangunan daerah dan otonomi daerah . Berdasarkan penelitian ini tugas yang sudah sepenuhnya dijalankan dengan efektif ialah tugas pelayanan masyarakat pada bagian peningkatan stabilitator infrastruktur. Sedangkan pada tugas yang sama namun pada bagian program bantuan PKH dan BLT belum sepenuhnya terlaksana secara adil dimana pada saat pembagian bantuan masih terdapat salah sasaran.

**Kata kunci:** kinerja lurah, pembangunan daerah, otonomi daerah

## PENDAHULUAN

Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah memilih perguruan tinggi yang kompeten dan berlokasi strategis, yang erat kaitannya dengan fungsi pelayanan public untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, keamanan, keadilan, dan perdamaian bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk masa yang akan datang, dalam hal ini didasarkan pada tahapan dan proses penyusunan suatu program kegiatan yang mencakup berbagai unsure untuk tujuan penggunaan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Masyarakat biasanya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Armando Soares, dkk, 2015).

Menurut Surjadi, (2012, dalam Muchamad Samsudin, 2021) Mengingat pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan menuju fungsi pelayanan masyarakat harus ditekankan atau dimulai dari bawah, khususnya dapat berupa pemerintah desa/kelurahan, selaku desa/kelurahan merupakan layanan masyarakat yang terdekat dan mudah diakses serta merupakan tempat disebarnya layanan bagi masyarakat garda depan. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pejabat tingkat bawah sebagai pengelola pemerintahan di tingkat bawah. Sebab, pada dasarnya mendapatkan pelayanan yang layak dari aparat pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara. Dengan pelayanan yang diterima diharapkan masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menunjang tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak yang ditentukan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara. Dalam memikirkan masalah pelayanan publik, perlu adanya peningkatan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik yang jujur, adil, membabitkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik sangat penting karena tugas utama pegawai pemerintah adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan ikhlas, tanpa memanfaatkan jabatan dan kekuasaan yang diberikan (Muchamad Samsudin, 2021).

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan bahwa Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas (a). pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; (b). pemberdayaan masyarakat; (c) pelayanan masyarakat; (d). penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (e). pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan (f). pembinaan lembaga kemasyarakatan. Keenam tugas tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan aman. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan mengenai tugas lurah diharapkan kedepannya jabatan tersebut tidak hanya menjadi contoh bagi pemimpin, namun peran pemimpin harus mampu memberikan dampak, aktif, dan menciptakan kerukunan, kedamaian dan kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat dimasa depan.

## TINJAUAN LITERATUR

### a. Kinerja

Menurut Prawirosentono (1999:2), kinerja adalah "Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika." Sedangkan Menurut Rivai (2005:14), "Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama." Adapun Faktor-faktor berpengaruh menentukan apakah berkinerja baik atau buruk. Dalam hal ini Banyak faktor menyebabkan kinerja buruk, termasuk: (1) kemampuan pribadi, (2) kemampuan manajer, (3) kesenjangan proses, (4) masalah lingkungan, (5) situasi pribadi, (6) motivasi."

### b. Konsep Pemerintahan Kelurahan

Secara umum, terdapat perbedaan antara "kelurahan" (desa kota) dan "desa" (pedesaan). Menurut Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani (2012:37), sebuah kelurahan adalah tingkat pemerintahan terkecil, sebanding dengan sebuah desa. Berbeda dengan desa, kekuasaan sebuah kelurahan untuk mengatur wilayahnya lebih terbatas. Sebuah desa berpotensi untuk berkembang menjadi sebuah kelurahan. Dalam pemerintahan Indonesia, sebuah kelurahan adalah pembagian di bawah kecamatan. Sebuah kelurahan merupakan wilayah kerja seorang "lurah" (kepala desa kota) sebagai unit pemerintahan lokal di kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Seorang lurah dengan status Pegawai Negeri Sipil memimpin sebuah kelurahan.

Informasi lebih lanjut mengenai penerapan pemerintahan kelurahan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Di dalam kecamatan, unit pemerintah daerah kabupaten atau kota disebut kelurahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelurahan dikepalai oleh seorang Lurah yang melapor dan diawasi oleh Bupati/Walikota melalui Camat. Atas usulan Camat, Bupati/Walikota mengangkat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil (Tuju, 2014).

### c. Peran Pemerintah Kelurahan Terhadap Pembangunan Otonomi Daerah.

Lurah bertugas mengkoordinasikan penyusunan program, pengelolaan keuangan, dan urusan umum, serta mengawasi, mengendalikan, dan membimbing pemerintahan desa. Lurah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketertiban umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Lurah bertugas memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan desa dan kewenangan pelaksanaan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lurah Mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelayanan Masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Selain memenuhi tanggung jawab dasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota No. 18 tahun 2013 mengenai konfigurasi dan operasi lingkungan, Pasal 5 menjelaskan peran tambahan seorang Lurah:

1. Melaksanakan inisiatif pemerintah daerah dan bekerja sama dengan Camat, Kepala Kecamatan, dan lembaga vertikal lain di bawah pengawasannya.
2. Terlibat dalam inisiatif pengembangan masyarakat, menyediakan layanan masyarakat, menjaga ketertiban umum, melindungi infrastruktur dan fasilitas publik, serta mendukung lembaga lingkungan.
3. Mengirimkan laporan waktu terkait kegiatan kerja kepada Kepala Daerah melalui Camat secara berkala.
4. Menyusun lingkungan yang sehat, hijau, dan bersih.

Jika Walikota memberikan tugas kepada Lurah, pemerintah kota harus memastikan bahwa tugas-tugas tersebut diberikan secara proporsional. Dalam konteks tanggung jawab dasar seorang Lurah yang telah disebutkan di atas, kepemimpinan Lurah melibatkan tindakan untuk membujuk atau mengorganisir orang-orang dalam pengelolaan urusan pemerintahan di lingkungan wilayah kerja Kelurahan di dalam kecamatan (Mahmudah et al., 2016)

#### **d. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah.**

Proses pengelolaan sumberdaya yang ada saat ini dan membentuk kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk menghasilkan peluang kerja baru dan mendorong aktivitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di dalam suatu wilayah disebut sebagai pembangunan ekonomi daerah. Perhatian utama dalam pembangunan daerah adalah penggunaan lembaga lokal, sumberdaya manusia, dan sumberdaya fisik untuk menekankan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan wilayah tertentu (pembangunan endogen). Perspektif ini mengarahkan kita pada program pembangunan berbasis wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup penemuan pasar-pasar baru, berbagi pengetahuan, pembentukan institusi baru, pengembangan industri-alternatif, peningkatan kualitas tenaga kerja untuk menciptakan barang dan jasa yang lebih baik, serta mendorong pendirian perusahaan-perusahaan baru. Tujuan utama dari setiap inisiatif pembangunan ekonomi daerah adalah menyediakan masyarakat lokal dengan lebih banyak peluang kerja, baik dari segi kuantitas maupun variasi. Pemerintah daerah dan masyarakat

harus bekerja sama untuk memimpin dalam pembangunan ekonomi daerah guna mencapai tujuan ini (Siwi, 2017).

#### **e. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah**

Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah dapat memainkan empat peran berbeda: mereka dapat menjadi pendorong untuk pembentukan proyek-proyek pembangunan daerah, koordinator, fasilitator, dan entrepreneur.

##### **1. Entrepreneur**

Sebagai seorang entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sebuah perusahaan. Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar sukses secara finansial, aset-aset pemerintah daerah perlu dikelola dengan lebih menguntungkan.

##### **2. Koordinator**

Pemerintah daerah dapat mengambil peran sebagai koordinator untuk merumuskan atau mengusulkan inisiatif pembangunan di wilayahnya. Melibatkan organisasi masyarakat dalam proses pengumpulan dan evaluasi data ekonomi, seperti lowongan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya, dapat memperluas peran ini dalam pembangunan ekonomi. Sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan perusahaan, masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya dalam penyusunan rencana, strategi, dan tujuan terkait dengan ekonomi.

##### **3. Fasilitator**

Dengan memperbaiki elemen lingkungan attitudinal (perilaku masyarakat atau aspek budaya) di wilayahnya, pemerintah daerah dapat mempercepat pertumbuhan. Hal ini akan memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan kebijakan perencanaan dan zonasi.

##### **4. Pemulih**

Dengan menerapkan inisiatif yang ditujukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuka dan memperluas usaha di wilayah tersebut, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan komunitas bisnis. Ada beberapa cara untuk memberikan stimulus ini, seperti membuat brosur, membangun zona industri, mendirikan toko untuk barang-barang usaha kecil, dan membantu mereka mengadakan pameran.

#### **f. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dari daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014). Sebaliknya, Daerah Otonom adalah unit masyarakat yang diakui secara hukum dengan batas wilayah yang jelas, yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan setempat serta kepentingan masyarakat, bertindak secara independen dan sesuai dengan tujuan masyarakat dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Safi'i (2007), yang mengutip Kaho (1998), otonomi daerah adalah kapasitas dan kewenangan untuk mengelola rumah tangga sendiri. Urusan rumah tangga adalah masalah-masalah yang muncul sebagai hasil dari kegiatan daerah dan dibiayai oleh pemerintah daerah. Sementara itu, definisi otonomi menurut Safrudin sebagaimana dikutip dalam Adisubrata (2003), mengacu pada kebebasan terbatas yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas yang lebih tinggi (pemerintah pusat), bukan kebebasan total (Widyaningsih, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa informasi lisan atau tertulis, serta perilaku yang dapat diamati. Selain itu, penelitian ini berfokus pada manusia sebagai informan utama penelitian ini, Moleong (2016, dalam Kristina Pasaribu, dkk, 2023). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya melalui data BPS (Badan Pusat Statistik).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Informan penelitian ini meliputi sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan topik penelitian, antara lain Camat Binaraga serta beberapa masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dengan menggunakan berbagai teknik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, Miles et al., (2014 dalam Kristina Pasaribu, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil Penelitian Peran Kepala Lurah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Binaraga, Kabupaten Labuhanbatu jika kita lihat dari segi Pembangunan daerah dan ekonomi masyarakat, banyak program yang sudah diterapkan pemerintah pada kelurahan Binaraga Kabupaten Labuhanbatu, Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa kelurahan dibentuk wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah mempunyai tugas, berikut ini Kebijakan atau Program kelurahan Binaraga dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat:

### **a. Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan Kelurahan**

Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan merupakan salah satu fungsi dari kelurahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, terdapat

beberapa seksi yang membantu kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, seperti seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi pemberdayaan masyarakat, dan seksi fisik, sarana, dan prasarana. Selain itu, lurah juga memiliki tugas untuk membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum serta pelayanan umum di tingkat kelurahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, lurah juga memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kelurahan serta membina, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan RW/RT dan masyarakat yang ada di wilayahnya.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, harkat, dan martabatnya. Pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pelatihan dan pendidikan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan produktivitas. Seperti yang sudah di terapkan oleh Kepala Desa Kelurahan Binaraga, Kabupaten Labuhanbatu, dengan membuat Program Pelatihan Menjahit dan Kompute, Dapat Dipaparkan sebagai berikut:

##### 1) Melaksanakan Program Pelatihan menjahit.

Pada penelitian yang kami laksanakan pemerintah Kelurahan Binaraga,kecamatan Rantau Utara, melakukan inovasi dalam pemanfaatan Desa Tahun Anggaran 2020- 2022. Yakni dengan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit. Pelatihan di lakukan untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengingat potensi SDM Warga Binaraga cukup besar dalam bidang tata busana, namun pelatihan ini tidak dilakukan oleh semua warga Binaraga, hanya beberapa orang yang menjadi perwakilan delapan Lingkungan sebanyak 20 orang diberikan bekal keterampilan menjahit. diantaranya Anak-anak remaja yang membutuhkan pelatihan ini, terpantau masih berusia Muda dan hanya beberapa dari kalangan Ibu rumah tangga. Kepala Desa mengharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, dengan memanfaatkan inovasi dan keterampilan mereka terkhususnya teruntuk kalangan remaja agar mengurangi Pengangguran Di daerah Kelurahan Binaraga Kabupaten Labuhanbatu. Program ini tidak berjalan lama hanya 3 tahun Pelaksanaan Program Pelatihan Menjahit ini.

##### 2) Melaksanakan Program Pelatihan Komputer.

Program pelatihan komputer dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan daya saing usaha di Kelurahan Binaraga. Beberapa topik yang dapat dicakup dalam program pelatihan digital di desa antara lain penggunaan media sosial untuk promosi produk lokal, pengelolaan keuangan

digital, dan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, Program pelatihan komputer di Kelurahan Binaraga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, seperti meningkatkan kemampuan literasi digital, meningkatkan akses ke informasi, dan memperluas kesempatan dalam mencari kerja, hal ini dapat mengurangi angka pengangguran, Program ini juga dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat setempat sehingga dapat membuka peluang usaha dan ekonomi yang lebih luas, Untuk pelaksanaannya, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, penyediaan fasilitas dan peralatan yang sesuai, serta pengembangan kurikulum dan metode pelatihan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan digital juga sangat penting. Pendidikan dan pelatihan yang inklusif dan berkesinambungan akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih maju dan sejahtera. Pelaksanaan pelatihan komputer gratis yang diselenggarakan oleh kelurahan Binaraga ini sebagai pemberdaya masyarakat terkhusus kalangan anak Remaja untuk meningkatkan kemampuan mereka terkait computer dengan memanfaatkan pelatihan Komputer ini buat masa yang akan datang termasuk pada dunia pekerjaan, sama seperti pelatihan menjahit, Program ini hanya beberapa orang yang menjadi perwakilan delapan Lingkungan sebanyak 20 orang diberikan bekal keterampilan computer.

### **c. Pelayanan Masyarakat**

Pelayanan masyarakat dapat berperan penting dalam pembangunan daerah, Dalam pembangunan daerah, pelayanan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Upaya pelayanan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat yang sudah diterapkan kelurahan Binaraga dalam pembangunan Otonomi daerah yang dapat dilakukan oleh pelayanan masyarakat:

#### **1. Peningkatan Stabilitator pada Infrastruktur.**

Kebijakan kepala Desa untuk menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan Perekonomian di Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara. Dalam hal ini perlunya peran kepala Desa, ketika keadaan kondisi lingkungan di daerah tersebut maupun peranan masyarakat yang tidak ikut serta maka sulit untuk di selenggarakannya berbagai kegiatan pembangunan ( Siagian, 1991), maka dari itu perlu nya peranan Lurah dan Masyarakat dalam mensejahteraka perekonomian Di

Kelurahan Binaraga, kecamatan Rantau Utara. dalam melakukan pembangunan infrastruktur, lurah perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam membangun infrastruktur, seorang kepala desa perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang andal sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, Pembangunan infrastruktur juga dapat membantu memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga mengenai jenis infrastruktur yang dibutuhkan dan bagaimana infrastruktur tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, Pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan ketersediaan bahan dan peralatan konstruksi untuk menjamin pembangunan berkelanjutan, Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, maka penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan menyeimbangkannya dengan ketersediaan bahan dan peralatan konstruksi.

2. Program Bantuan Sosial PKH dan BLT.

Membuat program-program inovatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro dan Membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga keuangan atau perusahaan, untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah , seperti yang sudah diterapkan di kelurahan Binaraga, kecamatan Rantau Utara, Kepala desa ikut serta dalam program Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan ( PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada pelaku UMKM. PKH merupakan Program nasional yang efektif, dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan.

**PENERIMA BANSOS**

**302 Jiwa sekitar 70,5 % di  
tahun 2023**

Adapun masyarakat yang berhak penerima PKH yaitu masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi atau penduduk miskin. Dari penelitian

yang sudah di lakukan, berikut ini data-data Penduduk miskin kabupaten labuhanbatu.

Kabupaten	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
Labuhanbatu	42.17	45.03	43.27

Source Url: <https://labuhanbatukab.bps.go.id/indicator/23/60/1/penduduk-miskin.html>

PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Penerima PKH memiliki perilaku ekonomi subsisten yaitu bantuan hanya digunakan memenuhi kebutuhan hidup minimal baik bahan makanan maupun non makanan (Habibullah, dkk, 2017).

Bantuan subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM adalah program bantuan dari pemerintah berupa uang tunai atau bantuan lainnya kepada para pelaku UMKM. Pemerintah memberikan bantuan UMKM berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 untuk setiap pelaku usaha. Pelaku UMKM dapat mengajukan permohonan pendaftaran ke Dinas Koperasi dan UKM daerah setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi. Bantuan ini disalurkan oleh pemerintah melalui 2 kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial. Sasaran dari bantuan ini adalah pelaku usaha mikro. Dengan adanya bantuan ini memberikan kontribusi besar pada ekonomi Indonesia, UMKM juga berhasil menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran UMKM membawa manfaat yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, mulai dari melancarkan perputaran uang, meningkatkan kreativitas dan inovasi, hingga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Tujuan lain dari adanya bantuan BLT ini agar terlaksananya berbagai kebijakan strategis agar dampak perekonomian di daerah dapat diantisipasi untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. Dalam Rangka Pengendalian perekonomian di Daerah disebutkan bahwa Belanja wajib perlindungan sosial, antara lain digunakan untuk:

1. Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan.

2. penciptaan lapangan kerja.
3. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

**d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum**

Pengertian keamanan dan ketertiban menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat Kelurahan Binaraga sudah menerapkan sistem keamanan dan ketertiban di daerah tersebut, dengan mengadakan poskamling di masing-masing lingkungan untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekitar. Masyarakat juga bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kelurahan Binaraga Terlihat dari warga yang ikut terlibat secara langsung berpartisipasi dalam mengawasi kawasan masing-masing.

**e. Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum**

Dalam pelayanan kepada masyarakat, prasarana dan fasilitas yang menunjang sangat berpengaruh besar, ketersediaan fasilitas dalam menunjang pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dengan adanya fasilitas tersebut, maka pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di kelurahan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Rantau Utara telah tersedia walaupun belum lengkap, fasilitas pelayanan umum sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum harus dilaksanakan dengan baik dan terus menerus. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum harus dilakukan secara terus menerus dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dan berkualitas serta memperkuat perekonomian daerah.

Adapun Kebijakan Kepala Desa di kelurahan Binaraga Kabupaten Labuhanbatu, menggelar orientasi peningkatan kapasitas Kader dan Sumber daya manusia (SDM) Pengelola Pos Pelayanan terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan program kesehatan berbasis masyarakat di Indonesia yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak. Program tersebut mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat berujung pada pembangunan ekonomi di daerah. Menurunkan angka stunting di kelurahan Binaraga merupakan program utama dalam pelayanan fasilitas kesehatan

masyarakat. pencegahan stunting kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita, kegiatan yang diadakan oleh Lurah Binaraga, kabupaten Labuhanbatu, kecamatan Rantau utara, Upaya Penurunan Stunting Melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil guna mencukupi kandungan gizi dan zat besi pada ibu hamil. Pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan seperti telur, ikan, ayam, daging dan susu. Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. dan mengurangi potensi stunting ke depannya.

#### **f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan**

Program Pembinaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Program ini terdiri dari 10 program pokok, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, lingkungan hidup, perencanaan sehat, dan kelestarian budaya dan pariwisata. Program ini dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh istri Pimpinan Daerah. secara fungsional. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak. Program Pembinaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki tujuan untuk memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Salah satu program pokok PKK adalah Pendidikan dan Keterampilan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga. Program ini dapat membantu keluarga dalam mengembangkan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Selain itu, PKK juga memiliki Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM), PKK juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi. Dengan demikian, Program Pembinaan PKK dapat membantu keluarga dalam mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari penjabaran Hasil Wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten labuhanbatu, pada Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan sebagian dari Program yang sudah diterapkan, sesuai dengan perencanaan yang sudah di tetapkan. Masyarakat juga ikut serta dalam pembangunan Daerah. Kebijakan lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat, kepala Desa membuat program mensejahterakan sumber daya manusia, untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat. Dari wawancara pemaparan masyarakat, program pelatihan menjahit dan pelatihan computer

tersebut hanya berlangsung 3 tahun, selama itu program tersebut berjalan dengan lancar, manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat termasuk dari segi perekonomian. Dengan menambahnya wawasan masyarakat dapat membuka peluang di dunia kerja. Pelayanan masyarakat dapat berperan penting dalam pembangunan daerah, Dalam pembangunan daerah, pelayanan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Kelurahan binaraga Lurah merencanakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan saluran pembuangan. Masyarakat di kelurahan Binaraga merasa bahwa dengan adanya perbaikan infrastruktur mempermudah masyarakat bebas beraktifitas tanpa ada hambatan, dengan begini pembangunan di daerah tersebut dapat mensejahterakan masyarakat. Adapun Pelayanan masyarakat yang sudah terlaksanakan jangka panjang yang cukup lama yaitu program Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan ( PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada pelaku UMKM. Untuk program pelaksanaan ini sudah sepenuhnya diterapkan oleh kepala Desa. Namun keluh kesah atau Tanggapan Masyarakat terkait penerapan kebijakan Program PKH atau BLT, bahwa Program Bantuan PKH atau BLT belum sepenuhnya merata untuk kalangan yang kurang mampu, kurang tepatnya sasaran karena data yang kurang valid, mentalitas masyarakat baik penerima program yang termasuk sejahtera namun enggan mengundurkan diri atau keluarga miskin penerima manfaat yang justru semakin tergantung dan tidak memiliki upaya untuk mengentaskan diri. Maka perlu didorong agar kades harus mempunyai keberanian untuk mencoret mereka yang sudah mampu. Diperlukan juga peran kepala desa dalam perbaikan data, termasuk verifikasi dan validasi ketika sudah ada yang naik kelas tidak miskin lagi. Dengan demikian sasaran penerima PKH menjadi lebih tepat. Oleh sebab itu perlu adanya kelembagaan sosial yang bisa difungsikan untuk melakukan advokasi terhadap kelompok miskin. Perlunya kelembagaan yang bisa menjadi sarana penyaluran hak orang miskin mendapatkan program dan bantuan.

## **KESIMPULAN**

Kesuksesan pembangunan di desa sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat, dan untuk menjalankan perannya dengan baik, mereka harus memiliki kemampuan yang optimal dalam mengelola program-program pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakatnya sangat diperlukan. Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Dari Hasil penelitian Yang kami Laksanakan, Adapun Sasaran dari tujuan tercapainya Indikator Kinerja Kepala Desa terhadap Pembangunan Otonomi Daerah.

1. Meningkatkan Pengembangan Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan serta sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi.
2. Meningkatkan kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Bidang perekonomian dan Pembangunan.
4. Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat, seperti program Posyandu dan menurunkan angka stunting untuk memperbaiki sumber daya Manusia yang sudah diterapkan oleh Kepala Desa Kelurahan Binaraga.
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adisubrata, W. S. (2003). *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi)*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Arif Sofianto, ( 2020), *Implementasi program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10 (01), hal 14 – 31.

Mahmudah, L. M., Idris, H. A., Si, M., Endang, D., & Si, M. (2016). *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap*. 4, 4766–4778.

Muhammad Ghazali dkk, (2022), *Pelatihan Peningkatan kemampuan Pengoperasian Komputer, Internet dan Aplikasi Desa*, jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Vol,3.No, 2, 2723 – 332.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang *Kelurahan*( Tamabahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4588.

Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen sumber daya manusia: Kebijakan kinerja karyawan*. Yogyakarta: BPFE. *Manaj. sumber daya Mns*.

Rivai, Veithzal. 2005. *Performance Appraisal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan (Placeholder1)(Placeholder1)Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028-1034

Siwi, H. F. D. (2017). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18, No.6, 1–11. <https://www.mendeley.com/library/>

Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).

Tuju, A. H. F. (2014). Kinerja Lurah Dalam Pelaksanaan Program Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Universitas Sam Ratulangi*, 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/160438-ID-kinerja-lurah-dalam-pelaksanaan-program.pdf>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widyaningsih, A. T. (2015). Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(3), 290. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i3.15326>

Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. *Hukum Konstitusi*. Penerbit Pustaka Setia: Bandung.